

## PERDAGANGAN ANTARPULAU BERAS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

### *Inter-Island Rice Trade in South Sulawesi Province*

Sri Hery Susilowati

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111  
E-mail: srihery@gmail.com*

Naskah diterima: 16 Maret 2017

Direvisi: 3 April 2017

Disetujui terbit: 2 Juni 2017

#### ABSTRACT

As the main staple food, rice is a strategic commodity. Rice production is seasonal and varies among regions. On the other hand, demand for rice is relatively continuous over time throughout the country. Given the characteristics of Indonesia as an archipelagic country dominated by marine areas, inter-island rice trade is a way of bridging the distribution of rice production supply from surplus areas to those deficit one. The study aims to analyze the inter-island rice trade in South Sulawesi including dynamics of inter-island rice trade in the last two decades, distribution of rice trade, and profit margin of each trade actor. Secondary data were collected from various related agencies in Jakarta and South Sulawesi. Primary data were obtained through a survey with farmers and traders as respondents and through group discussions with key informants in 3 regencies/municipality in South Sulawesi Province. Analysis results show that dynamics of inter-island rice traded from South Sulawesi relatively unstable with an increasing trend. Peak shipments occurred in October and the largest share of rice shipments came from Pare-Pare Municipality (60.5%). Jakarta is the main destination for rice delivery with the largest number of shipments (33%), followed by Belawan and Ambon. Considering the characteristics of rice production, consumption and market integration, and importance of rice as an economic and political commodity, inter-rice trade policy can be used as an instrument for stabilizing rice prices. It is necessary to manage spatial and continuous network of marketing activities at national level, i.e. procurement, distribution and storage, according to the rice market size in each region.

**Key words:** *rice, inter-island trade, trade margin*

#### ABSTRAK

Sebagai bahan pangan pokok utama, beras merupakan komoditas strategis. Produksi beras dipengaruhi oleh musim dan terdapat kesenjangan antarwilayah, sebaliknya permintaan beras menyebar sepanjang waktu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang didominasi oleh wilayah perairan, perdagangan antarpulau beras merupakan cara yang ditempuh dalam menjembatani distribusi pasokan produksi beras dari wilayah surplus dengan permintaan dari wilayah defisit. Tujuan kajian adalah untuk menganalisis keragaan perdagangan antarpulau beras di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi dinamika perdagangan antarpulau beras dalam dua dekade terakhir, distribusi perdagangan beras serta margin yang diperoleh masing-masing pelaku perdagangan beras di Sulawesi Selatan. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait di Jakarta dan Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh melalui pendekatan survei kepada petani dan pedagang dan melalui diskusi kelompok dengan informan kunci di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisis menunjukkan dinamika volume beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan relatif berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Puncak pengiriman beras antarpulau terjadi pada bulan Oktober dan pangsa pengiriman beras terbesar berasal dari Kabupaten Pare-Pare (60,5%). Jakarta merupakan kota tujuan pengiriman beras utama dengan jumlah pengiriman terbesar, diikuti Belawan dan Ambon. Dengan pertimbangan karakteristik produksi, konsumsi beras, dan pasar beras yang terintegrasi, serta pentingnya beras sebagai komoditas ekonomi dan politik, maka kebijakan perdagangan antarpulau beras dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk stabilisasi harga beras. Untuk itu diperlukan kebijakan Pemerintah yang mengelola jaringan kegiatan pemasaran antartempat dan antarwaktu (pengadaan, penyaluran dan penyimpanan) secara nasional yang disesuaikan dengan besar kecilnya pasar beras di masing-masing wilayah/daerah.

**Kata kunci:** *beras, perdagangan antarpulau, margin perdagangan*

## PENDAHULUAN

Sebagai bahan pangan utama yang menjadi kebutuhan dasar bagi mayoritas penduduk Indonesia, beras merupakan komoditas strategis. Kebutuhan akan pangan tidak dapat ditunda, sementara produksi komoditas pangan dipengaruhi oleh musim dan terdapat kesenjangan antarwilayah. Dari sisi produksi, selama satu dekade terakhir, 53,5% dari keseluruhan padi dihasilkan di Pulau Jawa, 24% di Pulau Sumatera, dan sisanya di pulau-pulau lainnya. Dari aspek antarwaktu, 60% produksi beras dihasilkan pada periode Januari-Mei, 30% pada periode Juni-Agustus dan 10% pada periode September (Ismet 2007). Sebaliknya dari sisi permintaan/konsumsi, permintaan beras menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan sepanjang waktu. Dengan karakteristik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.500 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia dan didominasi oleh wilayah perairan, serta terdapat kesenjangan produksi beras antarwilayah/pulau, hal ini merupakan tantangan bagaimana menjembatani distribusi antara pasokan produksi beras dari wilayah produsen dengan permintaan dari wilayah konsumen. Untuk menjembatani dua sisi tersebut, melalui perdagangan antarpulau, bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayah konsumen, tetapi juga mendorong peningkatan produksi beras dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani di wilayah produsen.

Pada dasarnya perdagangan antarpulau beras telah dimulai sejak jaman Majapahit. Secara geografis, komoditas padi/beras sangat cocok dikembangkan di kerajaan Majapahit dan dijadikan keunggulan komoditas dagang untuk perdagangan antarwilayah. Jawa dan Nusantara pada umumnya terletak di jalur pelayaran dan perdagangan strategis yang dikenal dengan jalur sutera. Faktor penting perdagangan dan pelayaran karena adanya sungai Brantas dan Bengawan Solo. Keberadaan kedua sungai tersebut memegang peranan penting dalam menyebarkan komoditas, sarana pengangkutan dari pedalaman ke pelabuhan dan dijadikan sebagai pendukung bagi perdagangan antarpulau/antarwilayah (Anwari 2015).

Perdagangan antarpulau beras terjadi karena ada perbedaan jumlah ketersediaan beras, sehingga beras dikirim dari daerah surplus ke daerah defisit, atau ada perbedaan preferensi terhadap jenis atau kualitas beras tertentu dan perbedaan daya beli masyarakat sehingga dilakukan pertukaran barang sesuai

dengan preferensi atau daya beli tersebut. Dengan semakin terbukanya akses wilayah dan semakin berkembangnya sarana transportasi, perdagangan antarpulau tidak hanya bermakna kegiatan perdagangan barang dari satu pulau ke pulau lain yang selama ini dilakukan melalui angkutan laut atau sungai, namun juga melalui transportasi darat dan udara. Dengan demikian kesenjangan produksi antarpulau dan antarwilayah dapat disinergikan dan manfaat pembangunan dapat terdistribusi secara seimbang. Perdagangan antarpulau juga diharapkan mampu juga menghilangkan disparitas harga antarpulau, walaupun masih terkendala oleh infrastruktur sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik karena proses bongkar muat yang relatif lambat dan keterbatasan dermaga. Perdagangan antarpulau merupakan salah satu upaya untuk mendistribusi komoditas pertanian yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan akses/keterjangkauan masyarakat terhadap komoditas pertanian terkait serta dalam upaya stabilisasi harga. Upaya distribusi pangan ini perlu ditingkatkan agar produk di daerah yang surplus dapat disalurkan ke daerah yang defisit. Perdagangan antarpulau dapat memberikan insentif bagi petani produsen untuk meningkatkan produksinya karena adanya jaminan pasar alternatif.

Berbagai faktor berpengaruh terhadap kinerja pemasaran produk pertanian, termasuk juga perdagangan antarpulau. Secara intrinsik faktor yang berpengaruh di antaranya adalah struktur pasar, tingkat integrasi pasar, dan margin pemasaran. Bentuk pasar yang mengarah pada pasar monopoli akan berpengaruh terhadap tingkat kompetisi yang akan berdampak terhadap pembentukan harga, transmisi harga, dan bagian harga yang diterima petani. Secara implisit struktur pasar akan berdampak terhadap kinerja integrasi pasar dan nilai margin pemasaran. Faktor eksternal yang berpengaruh pada hakekatnya adalah terkait dengan kebijakan pemerintah seperti pengembangan infrastruktur pemasaran (fisik dan kelembagaan), program stabilisasi harga output, perpajakan dan redistribusi, kebijakan pengembangan produk dan pengolahan hasil pertanian, dan lainnya (Rusastra et al. 2003). Terkait dengan faktor infrastruktur, hasil analisis Farid dan Subekti (2012) menyatakan bahwa disparitas harga komoditas pertanian antarwilayah dipengaruhi secara nyata dan bersifat negatif oleh infrastruktur yang diproksi dari rasio panjang jalan terhadap luas wilayah. Hal ini berarti semakin kurang infrastruktur maka disparitas harga akan semakin tinggi. Demikian pula Tabor (2015) juga mengidentifikasi

infrastruktur yang buruk mengakibatkan tingginya biaya logistik; pelabuhan yang sangat padat dengan fasilitas yang kurang serta tingginya biaya transportasi antarpulau mengakibatkan meningkatnya struktur biaya secara umum dan makin lebarnya disparitas harga khususnya di wilayah remote. Kesemuanya merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara fluktuasi produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan dengan harga beras di beberapa provinsi tujuan utama pengiriman beras dari Sulawesi Selatan, keragaan dan dinamika perdagangan antarpulau beras dalam dua dekade terakhir, distribusi perdagangan beras serta margin masing-masing pelaku perdagangan beras di Sulawesi Selatan. Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pemangku kepentingan terkait dalam memahami kinerja perdagangan antarpulau beras di Sulawesi Selatan.

## METODOLOGI

### Kerangka Pemikiran

Terjadinya perdagangan antarpulau/antarwilayah dapat dilandasi dari kerangka pembangunan regional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pertumbuhan wilayah merupakan produk dari banyak faktor, sebagian bersifat internal dan sebagian lagi bersifat eksternal. Faktor-faktor yang berasal dari daerah itu sendiri meliputi distribusi faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Terkait dengan tenaga kerja, jika akses tenaga kerja terhadap modal semakin besar, maka produktivitas tenaga kerja semakin tinggi. Produktivitas tenaga kerja yang menghasilkan produk yang diperdagangkan ke luar wilayah, secara umum lebih tinggi dibanding produktivitas seluruh tenaga kerja yang juga menghasilkan produk untuk konsumsi domestik (Sitorus 2014). Sedangkan faktor eksternal yang utama adalah tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditas yang dihasilkan daerah tersebut.

Dalam konteks perdagangan antarpulau/antarwilayah, komoditas yang diperdagangkan dari Sulawesi ke pulau-pulau atau wilayah-

wilayah lain karena adanya disparitas produksi dan harga antara wilayah surplus beras ke wilayah defisit beras. Faktor-faktor penyebab disparitas tersebut antara lain: (a) perbedaan kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah, perbedaan kandungan sumber daya alam akan memengaruhi kegiatan produksi dan hasil pada daerah yang bersangkutan, dimana daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah, (b) perbedaan kondisi demografi, yang meliputi kondisi ketenagakerjaan, struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kultur budaya pertanian masyarakat, (c) mobilitas barang dan jasa akan memengaruhi kegiatan perdagangan antarpulau/antarwilayah, yang meliputi penyediaan fasilitas jalan, jembatan, alat transportasi baik darat, laut maupun udara, dan lainnya, serta (d) perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antarwilayah (Darman 2013).

### Lingkup Bahasan

Lingkup bahasan utama naskah ini adalah keragaan perdagangan antarpulau di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pemasok beras ke provinsi-provinsi lain di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Irian dan lainnya, distribusi beras yang diantarpulaukan ke wilayah-wilayah lain, dan rantai tata niaga beras. Dengan memahami pola produksi, pola perdagangan dan distribusi beras antarpulau, dapat digunakan sebagai antisipasi terhadap ketidakstabilan harga beras baik di wilayah surplus maupun wilayah defisit beras.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian PSEKP yang dilakukan tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu April sampai dengan Nopember 2016. Pendalaman analisis khususnya pada tingkat usaha tani dan tingkat pedagang dilakukan di Kabupaten Sidrap dan Pinrang.

### Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait di Jakarta, di antaranya Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Badan Karantina Pertanian dan Badan Ketahanan

Pangan Kementerian Pertanian. Data dan informasi juga digali dari instansi terkait di Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Pare-Pare. Data primer diperoleh melalui pendekatan survei kepada petani dan pedagang serta melalui diskusi kelompok dengan informan kunci.

**Analisis Data**

Kajian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis hubungan antara fluktuasi produksi beras di Sulawesi Selatan dengan harga beras di beberapa provinsi konsumen dan margin tata niaga. Selain itu juga dilakukan analisis kualitatif baik terhadap data sekunder yang berasal dari berbagai instansi dan data primer hasil survei yang disajikan dalam tabel analisis.

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan dengan harga beras di beberapa provinsi konsumen digunakan metode korelasi Pearson dengan formula sebagai berikut (Zou et al. 2003).

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \dots\dots\dots(1)$$

dimana:

- $r_{xy}$  = koefisien korelasi produksi beras dengan harga beras
- $n$  = jumlah contoh
- $X$  = peubah produksi beras
- $Y$  = peubah harga beras

Analisis margin pemasaran dihitung dengan menggunakan formula:

$$Mp = Pr - Pf \dots\dots\dots(2)$$

dimana:

- $Mp$  = Margin pemasaran (Rp/kg)
- $Pr$  = Harga ditingkat konsumen (Rp/kg)
- $Pf$  = Harga ditingkat produsen (Rp/kg)

Sedangkan pangsa keuntungan pada tiap-tiap tingkat lembaga pemasaran dihitung dengan formula:

$$SK_i = \frac{K_i}{P_{b_i}} \times 100\%$$

$$K_i = P_{j_i} - P_{b_i} - \sum_{j=1}^n B_{ij} \dots\dots\dots(3)$$

dimana:

- $SK_i$  = Share keuntungan lembaga pemasaran ke  $i$
- $K_i$  = Keuntungan lembaga pemasaran ke  $i$  (Rp/kg)
- $P_{j_i}$  = Harga jual lembaga ke  $i$  (Rp/kg)
- $P_{b_i}$  = Harga beli lembaga ke  $i$  (Rp/kg)
- $B_{ij}$  = Biaya pemasaran lembaga ke  $i$  dari berbagai jenis biaya mulai dari biaya ke  $j = 1$  sampai ke  $n$  (Rp/kg)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Regulasi dan Kebijakan Perdagangan Antarpulau**

Sampai saat ini kegiatan perdagangan antarpulau dipayungi oleh Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Perdagangan antarpulau beras belum secara khusus ada perundangan yang memayunginya, namun ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur tentang antarpulau gula kristal putih, yaitu Permendag RI Nomor 74/M-Dag/Per/9/2015 tentang perdagangan antarpulau gula kristal rafinasi. Jika mengacu pada Permendag tersebut, pengertian perdagangan antarpulau adalah kegiatan pendistribusian komoditas (gula kristal rafinasi) yang dilakukan oleh produsen (gula kristal rafinasi) kepada industri pengguna dari satu pulau ke pulau lain atau antardaerah dalam satu pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut. Definisi perdagangan antarpulau juga terdapat dalam Permendag RI Nomor 46/ M-Dag/ Per/ 8/ 2014 tentang ketentuan umum verifikasi atau penelusuran teknis di bidang perdagangan. Pada Permendag tersebut perdagangan antarpulau wajib dilakukan penelusuran teknis sebagai dokumen pelengkap pada kegiatan bongkar muat barang dalam perdagangan antarpulau. Definisi perdagangan antarpulau pada Permendag tersebut adalah kegiatan jual beli dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain atau dalam satu pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut. Yang ingin ditekankan dalam pembahasan ini adalah perdagangan antarpulau dibatasi berupa kegiatan pendistribusian dari satu pulau ke pulau lain atau antardaerah dalam satu pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut. Dengan demikian untuk perdagangan antarpulau atau antardaerah yang menggunakan transportasi darat tidak digolongkan sebagai perdagangan antarpulau. Padahal dalam operasionalnya, perdagangan antarpulau dan antardaerah dalam satu pulau

tidak hanya dilakukan melalui angkutan laut atau sungai namun juga melalui darat dengan menggunakan truk. Sebagai contoh, pemasaran dan distribusi beras antarpulau yang berasal dari Sulawesi Selatan (10 kabupaten/kota) dilakukan melalui 14 pelabuhan dan 3 jalur darat, yaitu menuju Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Tiga wilayah tersebut berada dalam satu pulau sehingga tidak termasuk dalam perdagangan antarpulau melainkan perdagangan antardaerah. Untuk perdagangan antarwilayah yang menggunakan transportasi darat data distribusi komoditas antarwilayah tidak dapat terdokumentasi secara baik. Sebelum tahun 2014, keluar masuknya hasil pertanian antarwilayah melalui jalur darat dicatat di jembatan timbang. Namun saat ini tidak lagi dilakukan pencatatan, dan pencatatan terakhir pada tahun 2014. Kendala dalam pelaksanaan jembatan timbang antara lain letaknya yang kurang strategis, dan banyak mobil pick up atau pribadi yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, sehingga tidak termonitor oleh jembatan timbang. Pelaporan dokumen perdagangan antarpulau melalui transportasi laut dilakukan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan atau Syahbandar. Seyogyanya sistem pelaporan tersebut terkoordinasi dengan dinas terkait, misalnya Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian untuk komoditas pangan dan Badan Pusat Statistik setempat. Namun sampai saat ini koordinasi tersebut belum berjalan dengan baik, sehingga data-data tentang perdagangan antarpulau sebagian diakses dari Kantor Otoritas Pelabuhan.

Di dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada pasal 23 disebutkan Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan antarpulau untuk integrasi pasar dalam negeri. Pengaturan tersebut diarahkan untuk: (a) menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus; (b) memperkecil senjangan harga antardaerah; (c) mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya; (d) mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah; (e) menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antarpulau; (f) mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri; (g) mencegah penyelundupan barang ke luar negeri; dan (h) meniadakan hambatan perdagangan antarpulau.

Regulasi yang mengatur perdagangan antarpulau atau antardaerah pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk melakukan pendistribusian komoditas dalam rangka memenuhi pemerataan kebutuhan bahan pangan pokok dan upaya stabilisasi harga, baik

harga di wilayah surplus maupun di wilayah defisit. Kebijakan stabilisasi harga komoditas di Indonesia mengacu pada UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan dan UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. UU Nomor 18 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Sedangkan UU RI Nomor 7 tahun 2014 menyebutkan pengaturan perdagangan bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.

Pelaksana kebijakan harga adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah di mana pada pasal 51 dalam UU Pangan dinyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban mengatur perdagangan pangan yang bertujuan untuk: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pangan pokok; (b) manajemen cadangan pangan; dan (c) penciptaan iklim usaha pangan yang sehat. Terkait dengan definisi barang kebutuhan pokok, pada Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, disebutkan jenis barang kebutuhan pokok ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu: a) beras; b) kedelai bahan baku tahu dan tempe; c) cabe; d) bawang merah.

Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dilakukan melalui: (a) penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah; (b) penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah; (c) pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah; (d) pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; (e) penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional; (f) pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan (g) pengaturan ekspor dan impor pangan.

Terkait dengan pendistribusian beras dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi surplus ke wilayah lain yang defisit, Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 5 Tahun 2015

tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah, memiliki keterkaitan dengan pendistribusian dan perdagangan beras antarpulau. Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan cadangan beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, Inpres tersebut menginstruksikan kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan pembelian gabah/beras di tingkat petani.

Selanjutnya melalui Perpres RI Nomor 48 Tahun 2016, Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai. Untuk tahun 2016, Bulog menerima penugasan untuk menyerap gabah/beras petani 3,9 juta ton. Terdiri atas pengadaan lewat jalur PSO (*public service obligation*) 3,2 juta ton dan jalur komersial 700.000 ton. Upaya ini diharapkan mampu memperpendek mata rantai penjualan gabah/beras sehingga lebih menguntungkan petani. Untuk mendukung kegiatan penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog, dilakukan melalui Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB), yang merupakan unit pabrikasi gabah/beras yang dibentuk oleh pemerintah, baik untuk kepentingan pelayanan publik maupun komersial. UPGB mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan usaha industri pangan khususnya beras beserta mata rantai aktivitasnya secara terintegrasi dengan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif, efisien, dan sinergis, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan usaha. Perum Bulog memiliki UPGB sebanyak 132 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. UPGB memperoleh bahan baku Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), dan beras berasal dari tiga sumber utama, yaitu *on-farm* mandiri, kemitraan dan sinergi, melalui petani/kelompok tani/gapoktan dan mitra kerja penggilingan. Hasil proses produksi UPGB berupa beras medium dengan kualitas PSO Bulog dipasarkan untuk PSO sedangkan kualitas medium lainnya dan premium dipasarkan ke pasaran umum secara ritel, dan grosir atau melalui perdagangan antarpulau, antarDivre/Subdivre dan UPGB (Bulog 2012).

Fluktuasi harga beras terjadi menurut musim, dimana saat panen raya suplai gabah meningkat dan jika tidak diserap oleh permintaan berakibat turunnya harga jual di

tingkat petani. Mengantisipasi hal tersebut, atas instruksi Presiden RI Kementerian Pertanian mengadakan Program Penyerapan Gabah Nasional dengan membentuk Tim Serap Gabah (Sergab) yang diterjunkan di berbagai provinsi produsen beras, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan. Tim Sergab akan bekerja sama dengan Bulog dan dibantu oleh TNI AD untuk memastikan seluruh gabah hasil panen petani dapat terserap dengan harga yang layak sesuai HPP sebesar Rp3.700/kg. Kementerian Pertanian menggandeng BRI dalam penyediaan dana pembelian gabah petani (Badan Litbang Pertanian 2016). Dengan tugas yang diemban oleh Bulog untuk pembelian gabah dan beras dalam negeri dalam rangka ketahanan pangan dan stabilisasi harga beras, maka dalam konteks perdagangan beras antarpulau di Provinsi Sulawesi Selatan, aktivitas yang dilakukan oleh Bulog dan Kementerian Pertanian dalam program yang dikenal sebagai "Sergab", sedikit banyak telah mengintervensi rantai tata niaga beras dan berpengaruh terhadap distribusi perdagangan antarpulau beras di Sulawesi Selatan.

Kinerja perdagangan antarpulau beras selain dipengaruhi oleh faktor intrinsik perdagangan, yaitu struktur pasar beras yang lebih lanjut akan menentukan nilai marjin, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang erat kaitannya dengan perdagangan antarpulau antara lain kebijakan atau program stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi, kebijakan impor, kebijakan distribusi, pengembangan industri pengolahan hasil, dan tidak kalah penting adalah kebijakan infrastruktur. Kemudahan akses sarana maupun aturan transportasi laut untuk berlangsungnya pengiriman barang antarpulau juga merupakan faktor keberhasilan kinerja perdagangan antarpulau. Seluruh kebijakan nasional tersebut saling terkait dalam memengaruhi kinerja perdagangan antar pulau.

Kelancaran perdagangan antarpulau dan antarwilayah di Sulawesi Selatan dipengaruhi pula oleh kesiapan logistik di provinsi tersebut. Kebijakan Pemerintah dalam membangun PDR (Pusat Distribusi Regional) yang berperan sebagai jaringan logistik penyangga distribusi komoditas pertanian di Sulawesi Selatan, dipandang tepat dalam mendorong kegiatan perdagangan antarpulau beras. Proses distribusi barang dari wilayah Makassar, didukung dengan infrastruktur transportasi, baik darat maupun laut. Infrastruktur transportasi darat yang penting adalah jalan tol Makassar. Ketersediaan jalan tol sangat mendukung pengiriman komoditas/barang dari/ke PDR

Makassar. Pelabuhan Makassar dan pelabuhan peti kemas Makassar berpotensi mendukung proses distribusi ke/dari PDR Makassar. Keberadaan kedua pelabuhan laut ini penting karena komoditas-komoditas yang berpotensi untuk ditangani PDR Makassar berasal dari berbagai wilayah, termasuk dari luar Sulawesi. Selain itu, beberapa komoditas lainnya yang berpotensi ditangani di PDR Makassar juga akan dikirimkan keluar Sulawesi, seperti beras yang pada saat ini dikirimkan ke berbagai provinsi lainnya di Indonesia (Kemendag 2013).

### Posisi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Produsen Beras di Indonesia

#### Peta Produksi Padi Antarpulau

Sebagai salah satu produsen utama beras di Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijadikan sebagai salah satu barometer terhadap ekonomi perberasan di Indonesia. Rata-rata kontribusi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap total produksi nasional selama 2011-2015 sebesar 7,22%, dan angka yang sama untuk kontribusi luas, rata-rata sementara untuk produktivitas berada di atas nasional. Meski jika dibandingkan dengan provinsi di Jawa, produksi padi Sulawesi Selatan masih lebih rendah, namun secara rata-rata jauh di atas rata-rata provinsi yang hanya sekitar 2,94% (Tabel 1). Kontribusi produksi padi Jawa Timur tertinggi (17,14%) kemudian Jawa Barat (16,46%), Jawa Tengah (14,45%) dan Sulawesi Selatan pada posisi urutan ke empat. Selama lima tahun terakhir, luas areal dan produksi padi Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh lebih besar dibanding pertumbuhan nasional, namun dilihat pertumbuhan produktivitas, tumbuh lebih lambat. Hal ini karena tahun 2015 produktivitas padi nasional meningkat nyata dari 51,35 kuintal/ha menjadi 53,41 kuintal/ha sementara Provinsi Sulawesi Selatan relatif stagnan.

Peningkatan produktivitas nasional tahun 2015 tersebut karena disokong oleh peningkatan produktivitas padi di Jawa dan Bali.

Peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai produsen beras di Pulau Sulawesi terlihat jelas dari kontribusi Sulawesi terhadap produksi nasional sebesar 7,26% sementara secara keseluruhan total pulau Sulawesi hanya berkontribusi sebesar 11,42% (Tabel 2). Dilihat dari kontribusi menurut pulau, Jawa menyumbang 52,24% terhadap total produksi padi nasional, berturut-turut kemudian pulau Sumatera (23,68%), Sulawesi (11,42%), Kalimantan (6,76%), dan sisanya terbagi untuk Bali dan Nusa Tenggara (5,4%) serta Maluku dan Papua (0,51%).

Dengan mencermati peta produksi antarpulau seperti tersebut, maka akan diperoleh gambaran pola perdagangan beras antarpulau, dimana pasokan beras akan mengalir dari wilayah surplus (*net* produsen) ke wilayah defisit (*net* konsumen). Aliran beras tersebut juga akan dipengaruhi oleh perbedaan musim tanam dan musim panen antarwilayah.

#### Keseimbangan Produksi dan Konsumsi

Aliran perdagangan beras antarpulau dapat diperkirakan dengan mencermati data perkiraan keseimbangan produksi dan konsumsi di beberapa provinsi yang mewakili provinsi *net* produsen dan *net* konsumen (Tabel 3). Dari gambaran data produksi dipadukan dengan data konsumsi, maka akan dapat diperoleh informasi status provinsi apakah sebagai *net* produsen (surplus) atau *net* konsumen (defisit). Sebagai konsekuensinya, beras akan mengalir dari wilayah berstatus *net* produsen ke wilayah berstatus *net* konsumen. Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur berstatus surplus, Maluku Utara dan Sumatera Utara surplus tipis, sementara DKI berstatus defisit.

Tabel 1. Pangsa luas, produktivitas, dan produksi padi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Nasional, 2011-2015

Tahun	Luas (ha)		Produktivitas (ku GKG/ha)		Produksi (ton GKG)	
	Nasional	Sulsel	Nasional	Sulsel	Nasional	Sulsel
2011	13.203.643	889.232	49,8	50,74	65.756.904	4.511.705
2012	13.445.524	981.394	51,36	50,98	69.056.126	5.003.011
2013	13.835.252	983.107	51,52	51,22	71.279.709	5.035.830
2014	13.797.307	1.040.024	51,35	52,17	70.846.465	5.426.097
2015	14.116.638	1.044.030	53,41	52,41	75.397.841	5.471.806
% Nasional (2011-15)	100	7,21	100	100,06	100	7,22
(%/tahun (2011-15))	1,60	3,79	1,40	0,88	2,99	4,67

Sumber: BPS (2011-2015), diolah

Keterangan: GKG = gabah kering giling

Tabel 2. Peta produksi padi antarpulau di Indonesia, 2011-2015

No.	Pulau/wilayah	Luas (ha)	Produktivitas (ku GKG /Ha)	Produksi (ton GKG)	% thd Nasional (2011-2015)		
					Luas	Produktivitas	Produksi
1.	Sumatera	3.520.123	47.372	16.687.214	25,73	92,01	23,68
2.	Jawa	6.329.367	58.148	36.811.463	46,27	112,93	52,24
3.	Bali dan Nusra	809.117	46.988	3.804.026	5,91	91,26	5,4
4.	Kalimantan	1.320.476	36.052	4.761.081	9,65	70,02	6,76
5.	Sulawesi	1.613.120	49.848	8.045.742	11,79	96,81	11,42
6.	Maluku dan Papua	87.469	40.792	357.883	0,64	79,23	0,51
7.	Luar Jawa	7.350.305	45.76	33.655.946	53,73	88,88	47,76
8.	Indonesia	13.679.673	51.488	70.467.409	100	100	100

Sumber: BPS (2016), diolah

DKI dan Maluku merupakan provinsi tujuan pengiriman beras yang dominan. Sumatera Utara merupakan provinsi surplus beras (meskipun surplus tipis), namun juga menjadi tujuan pengiriman beras yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan antarpulau beras tidak hanya ditentukan oleh kondisi agregat surplus-defisit provinsi yang bersangkutan, tetapi juga terdapat faktor lain yang menyebabkan aliran beras antarprovinsi tersebut, di antaranya perbedaan preferensi terhadap jenis dan kualitas beras serta perbedaan harga.

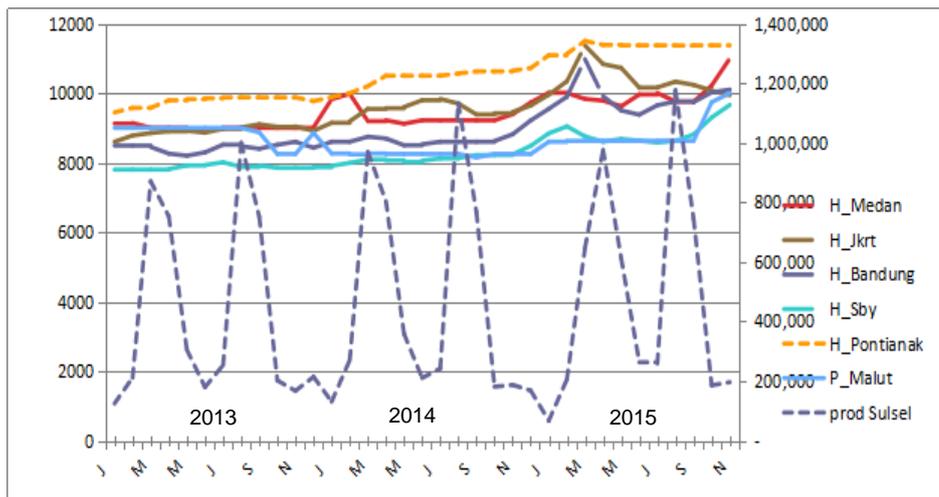
#### **Fluktuasi Produksi dan Harga Beras**

Pengiriman beras antarwilayah pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan harga antarwilayah dan posisi surplus/defisit komoditas pada wilayah yang bersangkutan. Sementara naik turunnya harga beras, ada kaitannya dengan fluktuasi produksi beras di wilayah produsen pemasok beras, yang salah satunya karena perbedaan pola panen. Fluktuasi produksi beras bulanan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai produsen beras akan memengaruhi pergerakan harga beras di daerah konsumen atau daerah lain. Secara nasional, ketidakstabilan harga antarmusim terkait erat dengan pola panen (Mardianto et al. 2005), yaitu panen raya yang umumnya berlangsung pada bulan Februari-Mei (60-65% dari total produksi nasional), panen musim gadu pertama yang berlangsung antara Juni-September (25-30%) dan sisanya panen antara bulan Oktober-Januari (5-15%). Meskipun dewasa ini di beberapa wilayah terjadi pergeseran musim tanam dan panen karena dampak perubahan iklim namun secara umum menunjukkan pola demikian. Ketidakstabilan harga beras dapat terjadi antarmusim (musim panen dan paceklik)

maupun antartahun (karena pengaruh iklim kekeringan atau kebanjiran) dan pergerakan harga pasar beras internasional. Ketidakstabilan harga dan produksi beras antarwilayah tersebut menentukan aliran beras yang diantarpulaukan dari Sulawesi Selatan.

Hubungan antara fluktuasi produksi beras di Sulawesi Selatan dengan harga beras di beberapa provinsi yang menerima pasokan beras dari Sulawesi Selatan (yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Pontianak, Maluku) ditunjukkan pada Gambar 1. Produksi beras di Sulawesi Selatan berfluktuasi menurut bulan, pada bulan April dan Agustus pada setiap tahun terjadi peningkatan volume produksi dan sebaliknya pada bulan Juni dan bulan Nopember-Januari, produksi beras menurun tajam. Hal ini berkaitan dengan pola tanam padi di Sulawesi Selatan. Dikaitkan dengan pergerakan harga beras di provinsi-provinsi penerima beras dari Sulawesi Selatan, terjadi pergerakan harga mengikuti pola tersebut meskipun tidak tampak secara nyata. Harga beras di Jakarta relatif lebih berfluktuasi mengikuti fluktuasi produksi beras Sulawesi Selatan, khususnya pada periode sepanjang 2015, demikian pula harga beras di Bandung. Meskipun Jawa Barat termasuk sentra produsen beras, namun juga menerima aliran beras dari Sulawesi Selatan.

Keeratan hubungan pergerakan produksi beras di Sulawesi Selatan dengan harga beras di beberapa provinsi penerima pasokan beras dari Sulawesi Selatan ditunjukkan melalui nilai koefisien korelasi harga yang ternyata relatif kecil (Tabel 4). Pergerakan harga di beberapa provinsi penerima pasokan beras Sulawesi Selatan tidak berhubungan erat dengan pergerakan produksi beras di Sulawesi Selatan.



Sumber: 1. Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan (2016a), diolah  
 2. BPS (2013a, 2014, 2015), diolah

Gambar 1. Fluktuasi bulanan produksi beras di Sulawesi Selatan dan harga beras di beberapa provinsi penerima pasokan beras, 2013-2015

Tanda koefisien korelasi antara produksi beras Sulawesi Selatan dengan harga beras Jakarta, Bandung, dan Pontianak bahkan tidak sesuai dengan harapan, dimana peningkatan harga beras di provinsi konsumen seiring dengan peningkatan produksi beras di Sulawesi Selatan. Fenomena di atas menarik, dan menunjukkan komoditas beras di pasar tidak murni mengikuti hukum penawaran dan permintaan pasar. Jika harga gabah dapat dicerminkan dari fluktuasi produksi gabah, hasil analisis Aryani (2012) tentang integrasi pasar produsen gabah dengan pasar ritel beras di Indonesia menunjukkan harga gabah produsen tidak memengaruhi harga beras ritel. Dapat dikatakan bahwa struktur pasar yang terjadi adalah pasar bersaing tidak sempurna. Apabila pasar gabah produsen dengan pasar ritel beras terintegrasi secara penuh maka perubahan harga gabah produsen juga diikuti dengan perubahan harga eceran beras. Pada kenyataannya hal ini tidak terjadi. Struktur pasar gabah dan beras yang terjadi secara umum adalah pasar bersaing tidak sempurna. Hal ini terjadi karena adanya berbagai intervensi pasar untuk komoditas bahan pokok yang strategis ini. Program Serap Gabah yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian merupakan salah satu instrumen intervensi. Selain itu kemudahan akses pasokan beras antarpulau menjadikan aliran beras bukan hanya dari Sulawesi Selatan namun juga aliran dari provinsi lainnya.

Hasil kajian Makbul et al. (2014) agak berbeda dengan hasil kajian Aryani (2012), yaitu terjadi integrasi harga beras di pasar konsumen

dengan harga gabah di tingkat produsen di Indonesia. Hal ini menunjukkan peningkatan harga beras di pasar konsumen berhubungan dengan fluktuasi harga gabah di tingkat produsen, namun bersifat tidak elastis dengan tingkat elastisitas harga 0,23, yang artinya setiap peningkatan 1% harga beras di pasar konsumen, harga gabah akan meningkat 0,23%.

**Pola Perdagangan Antarpulau**

***Dinamika Perdagangan Beras Antarpulau***

Kegiatan bongkar (menerima kiriman dari luar Provinsi Sulawesi Selatan) dan muat (mengirimkan barang ke luar Provinsi Sulawesi Selatan) pada kegiatan perdagangan antarpulau di Sulawesi Selatan dilakukan di 10 pelabuhan yang berada di Sulawesi Selatan. Barang yang dimuat atau dikirimkan ke lain wilayah berbagai macam barang, baik beras, palawija (jagung), makanan ternak/ayam dan barang-barang nonpertanian lain seperti semen, pupuk, marmer, karton dan sebagainya, yang pada umumnya merupakan produk dari provinsi tersebut. Sedangkan barang-barang yang dibongkar atau dikirim dari wilayah lain yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan antara lain gula pasir, makanan ringan, minyak goreng, rokok dan barang-barang nonpertanian lain seperti kaca, sabun, kertas, dan keramik. Dengan demikian tidak ada aliran beras masuk ke Sulawesi Selatan atau dengan kata lain beras yang berada di pasaran Sulawesi Selatan seluruhnya berasal dari Sulawesi Selatan.

Tabel 3. Perkiraan keseimbangan produksi dan konsumsi beras di beberapa provinsi, 2010-2015

Provinsi/Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
<b>Sulawesi Selatan</b>						
Produksi (ton)	2.750.421	2.831.546	3.139.890	3.160.487	3.405.418	3.434.105
Konsumsi (kg/kap/thn)	119,40	124,10	114,80	119,50	115,70	102.72
Total konsumsi (ton)	940.270	1.004.987	938.098	986.722	973.097	875.513
Defisit/surplus (ton)	1.810.151	1.826.559	2.201.792	2.173.765	2.432.321	2.558.592
<b>Jawa Barat</b>						
Produksi	7.366.185	7.301.430	7.074.220	7.583.392	7.308.339	7.137.785
Konsumsi (kg/kap/thn)	108,90	111,70	103,00	105,30	105,30	90.59
Total konsumsi (ton)	4.614.768	4.875.330	4.571.153	4.751.029	4.829.003	2.145.262
Defisit/surplus (ton)	2.751.417	2.426.100	2.503.067	2.832.363	2.479.336	4.992.523
<b>Jawa Timur</b>						
Produksi	7.307.632	6.637.838	7.655.909	7.562.167	7.780.388	8.256.057
Konsumsi (kg/kap/thn)	90,70	95,60	91,70	89,40	91,40	80.64
Total konsumsi (ton)	3.286.430	3.598.232	3.469.367	3.400.144	3.523.324	1.546.062
Defisit/surplus (ton)	4.021.202	3.039.606	4.186.542	4.162.023	4.257.064	6.709.995
<b>DKI Jakarta</b>						
Produksi	7.007	5.972	6.931	6.444	4.733	3.992
Konsumsi (kg/kap/thn)	85,20	89,40	78,80	85,40	88,40	68.49
Total konsumsi (ton)	764.088	867.457	774.769	852.106	888.368	346.737
Defisit/surplus (ton)	(757.082)	(861.485)	(767.838)	(845.662)	(883.635)	-342.745
<b>Sumatera Utara</b>						
Produksi	2.248.253	2.264.006	2.331.857	2.339.221	2.278.840	2.538.535
Konsumsi (kg/kap/thn)	117,10	119,70	110,90	110,10	108,90	105.14
Total konsumsi (ton)	1.543.341	1.565.488	1.462.724	1.466.035	1.494.446	731.207
Defisit/surplus (ton)	704.912	698.518	869.133	873.186	784.394	1.807.328
<b>Maluku Utara</b>						
Produksi	34.770	38.553	41.225	45.466	45.234	47.236
Konsumsi (kg/kap/thn)	64,80	66,30	69,50	66,70	72,50	77.67
Total konsumsi (ton)	64.582	70.299	75.341	74.198	82.121	46.074
Defisit/surplus (ton)	(29.812)	(31.746)	(34.116)	(28.732)	(36.887)	1.162

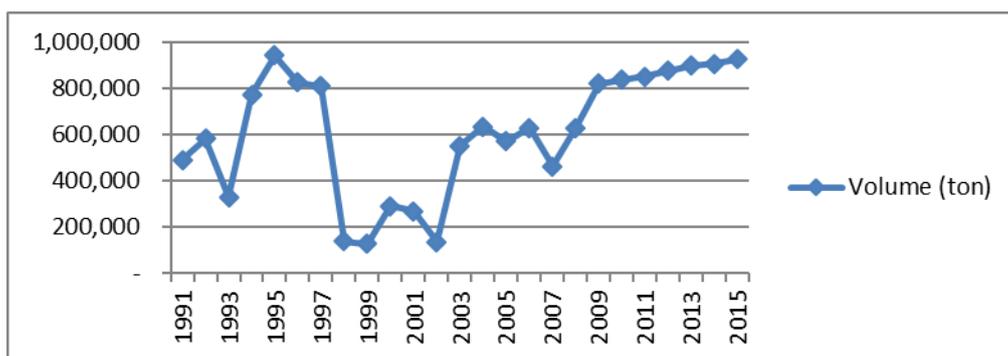
Sumber: 1. Pusdatin (2015), data produksi

2. BKP (2015), data konsumsi

\*Estimasi dari konsumsi perkapita Susenas (2014) dengan perkiraan jumlah penduduk BPS (2013)

Volume beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1991 sampai dengan 2015 relatif berfluktuasi. Volume terbesar dicapai pada tahun 1995 hampir satu juta ton, namun tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat tajam sampai mencapai titik terendah sepanjang 1991-2015, hanya sekitar 128 ribu ton, yaitu pada tahun 1999 saat krisis ekonomi melanda dunia dan juga Indonesia. Namun setelah puncak penurunan tersebut, secara perlahan volume antarpulau beras kembali meningkat namun kembali merosot tahun 2002, dengan posisi hampir sama dengan puncak terendah tahun 1999. Setelah itu kembali meningkat dan kembali merosot tahun 2007 dan selanjutnya volume beras antarpulau kembali meningkat sampai dengan saat ini (Gambar 2). Jika perkembangan jumlah beras yang diantarpulaukan tersebut dianalisis pertumbuhannya menurut periode lima tahunan, maka pertumbuhan volume beras yang diantar-

pulauan mengalami pertumbuhan terendah pada periode tahun 1995-1999, yaitu turun sekitar 57,85%/tahun (menurun dari 945 ribu ton tahun 1995 menjadi hanya 128 ribu ton tahun 1999). Hal ini diduga erat kaitannya dengan dampak krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia. Selama periode 1998-1999, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Krisis ekonomi, yang dibarengi dengan kegagalan produksi pangan, berdampak pada penurunan volume perdagangan antarpulau demikian tajam. Dari sisi produksi, resesi ekonomi telah menyebabkan biaya-biaya produksi pangan mengalami kenaikan sangat tinggi. Dari sisi konsumsi, daya beli masyarakat menurun karena adanya kenaikan harga pangan yang sangat tinggi, baik disebabkan karena naiknya biaya produksi (kenaikan biaya input, tenaga kerja dan modal) maupun berkurangnya suplai pangan akibat pengaruh El-Nino. Namun setelah periode tersebut pertumbuhan volume beras antarpulau kembali



Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan (2016b), diolah

Gambar 2. Fluktuasi volume beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan, 1991-2015

Tabel 4. Koefisien korelasi antara produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan dengan harga beras di beberapa provinsi konsumen, 2013-2015

	Produksi Sulse	Harga beras					
		Medan	Jakarta	Bandung	Surabaya	Pontianak	Malut
Produksi Sulse	1,000						
Harga beras Medan	-0,174	1,000					
Harga beras Jakarta	0,224	0,636	1,000				
Harga beras Bandung	0,072	0,801	0,884	1,000			
Harga beras Surabaya	-0,061	0,884	0,757	0,882	1,000		
Harga beras Pontianak	0,121	0,750	0,929	0,874	0,881	1,000	
Harga beras Malut	-0,082	0,305	-0,072	0,239	0,377	0,027	1,000

Sumber: 1. Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan (2016a), diolah  
2. BPS (2013, 2014, 2015), diolah

meningkat tajam yaitu 22,8% per tahun pada periode tahun 2000-2004 dan periode berikutnya meningkat dengan pertumbuhan moderat, yaitu 7,28%/tahun pada periode 2005-2009 dan 2% per tahun periode 2010-2015. Jika pertumbuhan volume beras antarpulau tersebut dianalisis secara keseluruhan tahun 1991-2015, tingkat pertumbuhan sebesar 3,16% per tahun.

Perdagangan antarpulau pada prinsipnya adalah aliran beras dari wilayah surplus ke wilayah minus atau wilayah yang pada periode tertentu membutuhkan pasokan beras dari wilayah surplus karena produksi beras di daerah sendiri tidak atau kurang mencukupi. Sudah barang tentu hal ini akan berimplikasi pada perbedaan harga beras pada periode tersebut di daerah surplus dan daerah yang membutuhkan. Aliran beras dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan dipengaruhi oleh musim tanam atau musim panen. Perbedaan musim tanam dan musim panen antarwilayah mengakibatkan wilayah yang sedang mengalami *off season*

(tidak panen) akan membutuhkan pasokan beras dari wilayah lain. Sebaliknya untuk wilayah yang berstatus surplus, jumlah beras yang diantarpulaukan juga dipengaruhi oleh musim, dimana pada saat musim panen, jumlah beras yang diantarpulaukan akan lebih besar dibandingkan dengan saat *off season*. Oleh karenanya, volume beras yang diantarpulaukan akan berfluktuasi menurut bulan yang mencerminkan periode panen dan periode *off season*.

Gambar 3 menunjukkan pola pengiriman beras antarpulau dari Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir menurut bulan. Pada gambar tersebut, secara umum, volume beras yang diantarpulaukan menunjukkan pola yang konsisten, dimana pengiriman beras meningkat pada bulan Oktober dan kemudian pada bulan berikutnya menurun. Hal ini ada hubungannya dengan musim panen padi. Secara umum pola musim tanam dan panen padi adalah bulan Oktober–Maret untuk Musim Hujan dan April–

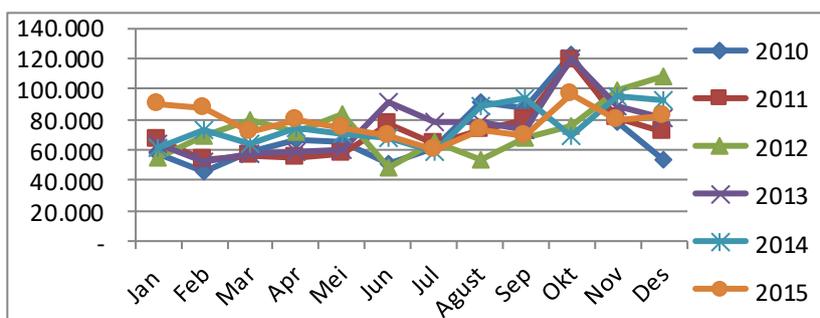
September untuk Musim Kemarau. Dengan demikian peningkatan volume beras yang diantarpulaukan pada bulan Oktober merupakan hasil panen musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Februari pengiriman beras cenderung rendah, yang berhubungan dengan Musim *off-season*, yaitu bulan Januari dan Februari. Selain pola yang umum tersebut juga terjadi penyimpangan pola untuk tahun tertentu. Secara umum pengiriman beras antarpulau meningkat pada bulan Oktober dan menurun pada bulan berikutnya, namun untuk tahun 2012, setelah bulan Oktober pengiriman beras masih terus meningkat sampai dengan bulan-bulan berikutnya. Hal ini diduga di antaranya karena pola tanam dan panen yang tidak seluruhnya serempak karena faktor ketersediaan air, selain juga terjadi pergeseran musim tanam/panen karena pengaruh perubahan iklim.

**Distribusi Pengiriman Beras Antarpulau**

Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai wilayah perairan, memiliki banyak pelabuhan sebagai sarana transportasi yang digunakan untuk aktivitas ekonomi, bahkan untuk satu kabupaten atau kota bisa terdapat lebih dari satu pelabuhan. Nama-nama pelabuhan di Sulawesi Selatan di masing-masing kota/kabupaten adalah sebagai berikut: (1) Soekarno Hatta, Paotere (Kota Makassar); (2) Garongkong, Awerangnge (Kabupaten Barru); (3) PT.Pelindo IV (Kabupaten Parepare); (4) Suppa, Pattirosompe (Kabupaten Pinrang); (5) Malili (Kabupaten Luwu Timur); (6) Siwa, Jalang, Doping (Kabupaten Wajo); (7) Bajoe, Mare, Kajuara (Kabupaten Bone); (8) Larearea (Kabupaten Sinjai); (9) Bira (Kabupaten Bulukumba); (10) Mattoanging (Kabupaten Bantaeng). Kegiatan bongkar dan muat barang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan tersebut (Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan

2015). Dalam hal ini beras yang diantarpulaukan berasal dari sebelas kabupaten/kota, yaitu Makassar, Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Bone, Luwu Timur, Pare-Pare, Barru, Wajo, Pinrang, dan Palopo (Tabel 5).

Dilihat dari pangsa pengiriman beras dari masing-masing kabupaten tahun 2015, sebesar 60,5% berasal dari Kabupaten Pare-Pare, merupakan pangsa terbesar di antara 11 kabupaten sedangkan sisanya tersebar di 10 kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan pedagang besar beras banyak terdapat di kabupaten tersebut, dan pasokan beras yang diantarpulaukan tidak hanya berasal dari Kabupaten Pare-Pare namun juga dipasok dari luar kabupaten. Selain itu kegiatan antarpulau beras juga didukung oleh keberadaan pelabuhan besar yaitu Pelabuhan PT. Pelindo IV yang berada di Kabupaten Pare-Pare. Kabupaten penghasil beras yang cukup besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Sidrap, pengiriman beras tujuan antarpulau sebagian dilakukan melalui pelabuhan Kota Makassar (pelabuhan Poetere) dan lainnya melalui pelabuhan Pare-Pare. Pangsa pengiriman beras dari Makassar tidak terlalu dominan, meskipun dilihat dari produksi beras di Makassar jauh lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya, namun dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar pula dibandingkan kabupaten lain, sebagian besar produksi beras dari Makassar digunakan untuk pasar lokal. Pangsa pengiriman terbesar setelah Pare-Pare adalah Kabupaten Bone. Kabupaten Luwu Timur dan Pinrang melakukan pengiriman beras antarpulau setelah tahun 2010. Beras yang diantarpulaukan melalui pelabuhan di kabupaten atau kota yang bersangkutan, tidak semuanya berasal dari beras produksi kabupaten tersebut, melainkan sebagian berasal dari luar kabupaten. Mengingat musim tanam/panen padi antarkabupaten tidak serentak, maka pedagang



Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan (2016), diolah

Gambar 3. Pola pengiriman beras antarpulau dari Sulawesi Selatan menurut bulan, 2010-2015

Tabel 5. Pangsa beras yang diantarpulaukan menurut kabupaten asal, 2007-2015

No.	Kabupaten/ kota	Tahun (%)									%/ tahun
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Makassar	7,5	10,1	22,6	10,8	7,0	3,8	3,7	4,0	4,0	13,6
2.	Bulukumba	1,1	0,7	2,9	1,2	1,5	0,7	0,6	0,9	0,9	-2,4
3.	Bantaeng	0,2	0,3	0,2	0,4	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	-9,9
4.	Sinjai	14,1	12,0	3,4	12,4	6,5	7,6	4,9	7,4	6,9	-0,1
5.	Bone	35,3	27,1	27,0	17,1	26,2	22,8	15,2	16,3	16,2	62,0
6.	Luwu Timur	-	-	-	1,1	0,8	1,3	0,7	1,2	1,2	1,5
7.	Pare-Pare	38,2	47,0	32,2	55,4	54,2	58,9	67,0	60,7	60,5	3,1
8.	Barru	0,6	0,5	5,1	0,3	0,4	1,5	0,5	0,5	0,7	25,4
9.	Wajo	2,0	0,4	0,7	1,1	2,0	0,0	0,0	1,5	1,6	6,9
10.	Pinrang	-	-	-	0,5	0,8	3,1	7,1	7,1	7,1	9,6
11.	Palopo	1,0	2,1	5,8	-	-	-	-	-	-	116,3
	Jumlah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
	Jumlah (ton)	470.2	628.73	822.73	833.28	852.63	876.2	899.74	907.14	922.55	6,71

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan (2016c), diolah

mencari beras ke berbagai wilayah yang sedang panen dan dikirimkan langsung melalui pelabuhan terdekat. Oleh karenanya dari hasil kajian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan (2015), disebutkan beras yang diantarpulaukan oleh pedagang, sekitar 77% berasal dari luar kabupaten asal pedagang tinggal, dan sebagian besar (81%) beras yang dibeli oleh pedagang langsung diantarpulaukan melalui pelabuhan terdekat, dan selebihnya dijual ke pasar lokal atau disimpan beberapa waktu, baru dijual atau diantarpulaukan. Dengan pola demikian, pedagang beras melakukan perdagangan antarpulau hanya sekedar mencari margin dari perbedaan harga beli beras dari penggilingan dengan harga jual antarpulau. Mereka tidak melakukan proses lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas sehingga diperoleh peningkatan harga jual (misalnya melakukan *repacking*, penyosohan ulang, *grading* dsb).

Distribusi beras yang diantarpulaukan menurut asal kabupaten selama tahun 2007-2015 relatif berfluktuasi. Hal ini berkaitan dengan perolehan beras oleh pedagang dari berbagai kabupaten lain. Jika dilihat dari pertumbuhan pengiriman beras per tahun, Kabupaten Pinrang memiliki pertumbuhan terbesar, meskipun dilihat dari total volume pengiriman beras, tidak termasuk tiga kabupaten terbesar. Kabupaten lainnya yang juga memiliki tingkat pertumbuhan cukup tinggi adalah Kabupaten Wajo, namun jumlah pengiriman masih relatif kecil dan belum kontinyu. Selain Kabupaten Wajo dan Pinrang, kabupaten lain justru mengalami pertumbuhan negatif, di antaranya adalah Bone, Makasar dan Sinjai, meskipun dari volume yang diantarpulaukan berada pada urutan tiga besar setelah Pare-Pare. Beras yang diantarpulaukan dari Makassar melalui pelabuhan Poetere bahkan memiliki pertumbuhan negatif paling

besar. Salah satu alasan yang menyebabkan kondisi tersebut yaitu volume pasokan beras yang diantarpulaukan tergantung dari mobilitas dan akses pedagang dalam mencari beras ke kabupaten-kabupaten lain, selain produksi beras dari dalam kabupaten yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena musim tanam dan panen yang tidak serentak antarkabupaten. Belum dapat diperoleh informasi lain dari kajian ini penyebab menurunnya pertumbuhan volume beras yang diantarpulaukan dari Makassar, namun jika dilihat peta posisi surplus/minus beras tiap kabupaten (Tabel 6), Kabupaten Pare-Pare yang memiliki pangsa pengiriman beras antarpulau terbesar, demikian pula Makassar yang juga memiliki pangsa relatif besar dibandingkan kabupaten lain, pada kenyataannya keseimbangan ketersediaan dan konsumsi dua kabupaten tersebut berada pada posisi minus. Kabupaten lain yang berada pada posisi minus adalah Enrekang dan Selayar, sedangkan kabupaten lainnya kesemuanya surplus. Kondisi ini memperkuat alasan bahwa pangsa pengiriman antarpulau beras terbesar dari Kabupaten Pare-Pare dan Makassar sesungguhnya pasokan berasnya berasal dari kabupaten lain. Pengiriman beras terbesar dari Pare-Pare dan Makassar karena pengiriman beras antarpulau dilakukan melalui pelabuhan di dua kabupaten tersebut yaitu pelabuhan besar PT. Pelindo IV di kota Pare-Pare dan Pelabuhan utama Makassar. Menurunnya pertumbuhan beras yang diantarpulaukan dari Makassar dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil analisis Zain et al. (2016a) tentang perdagangan antarpulau beras di Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa biaya transportasi mempunyai pengaruh sangat nyata yang bersifat negatif terhadap intensitas perdagangan antarpulau beras di Sulawesi Selatan. Meningkatnya biaya transportasi dan biaya transaksi lainnya akan menurunkan volume perdagangan beras antarpulau.

Tabel 6. Posisi surplus/minus beras menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

No.	Kabupaten/kota	Penduduk (jiwa)	Konsumsi (ton)	Ketersediaan (ton)	Surplus/minus (ton)
1.	Selayar	109.415	14.600	2.641	(11.959)
2.	Bulukumba	371.453	49.567	109.332	59.765
3.	Bantaeng	164.841	21.996	47.841	25.845
4.	Jeneponto	323.245	43.134	46.907	3.773
5.	Takalar	240.578	32.103	51.021	18.918
6.	Gowa	552.293	73.698	130.454	56.756
7.	Sinjai	216.589	28.902	44.742	15.840
8.	Maros	286.260	38.199	95.864	57.666
9.	Pangkep	275.151	36.716	61.026	24.310
10.	Barro	156.661	20.905	39.518	18.614
11.	Bone	679.904	90.726	469.335	378.608
12.	Soppeng	224.121	29.907	95.044	65.137
13.	Wajo	362.683	48.396	237.329	188.933
14.	Sidrap	246.259	32.861	191.690	158.829
15.	Pinrang	331.592	44.248	217.293	173.045
16.	Enrekang	175.962	23.480	13.847	(9.634)
17.	Luwu	425.834	56.823	143.719	86.896
18.	Tator	416.610	55.592	64.767	9.174
19.	Luwu Utara	462.437	61.708	135.946	74.239
20.	Makassar	1.145.406	152.843	5.485	(147.358)
21.	Pare-Pare	113.057	15.086	2.363	(12.724)
	Jumlah	8.213.864	1.096.058	2.363.604	1.267.546

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan 2013 *dalam* Zain et al. (2016c)

Dari hasil kajian yang lain, Zain et al. (2016b) juga menyebutkan bahwa fluktuasi pengiriman beras antarpulau dari Sulawesi Selatan tidak semata-mata ditentukan oleh fluktuasi produksi beras di Sulawesi Selatan maupun fluktuasi produksi di wilayah tujuan, namun faktor kualitas beras juga memengaruhi daya saing beras yang diantarpulaukan dari Sulawesi Selatan. Rekomendasi kajian tersebut adalah diperlukan pembinaan kapasitas petani untuk meningkatkan kualitas produksi yang dihasilkan selain juga untuk meningkatkan posisi tawar petani.

Sementara itu kota-kota yang menjadi tujuan pengiriman beras antarpulau dari pelabuhan Makassar pada tahun 2015 diurutkan dari jumlah terbesar berturut-turut adalah Jakarta, Belawan, Ambon, Surabaya, Bitung, Banjarmasin, Tual, Ternate, Kupang, dan Sorong (Tabel 7). Jakarta merupakan kota tujuan pengiriman beras utama dengan jumlah pengiriman terbesar mencapai 183.516,2 ton. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan beras yang diantarpulaukan ke Belawan, yang merupakan urutan kedua terbesar tujuan pengiriman beras dari Sulawesi Selatan, sebesar 87.888,7 ton. Surabaya juga merupakan salah satu kota sepuluh terbesar yang menjadi tujuan pengiriman beras dari Sulawesi Selatan. Hal ini menarik, mengingat Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur yang notabene sebagai provinsi produsen utama beras di Jawa. Lagi-lagi data tersebut menunjukkan bahwa aliran beras tidak hanya

terjadi dari daerah surplus ke daerah minus, namun aliran beras juga menuju ke daerah produsen beras. Hal ini dapat terjadi karena ada perbedaan musim panen antarwilayah, perbedaan harga ataupun perbedaan preferensi terhadap jenis atau kualitas beras oleh konsumen. Tujuan pengiriman ke pulau Irian di antaranya ke Manokwari, Timika, Biak, Merauke, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Kaimana, namun dengan jumlah pengiriman yang sedikit dan tidak kontinyu setiap tahun. Tujuan ke pulau Sulawesi hanya ke Kendari, sedangkan tujuan ke Kalimantan antara lain ke Banjarmasin, Balikpapan, Sampit, Samarinda. Tujuan ke pulau Sumatera antara lain ke Belawan, Bitung dan Palembang. Pengiriman beras terbesar dari pelabuhan Makassar pada tahun 2015 terjadi pada bulan Agustus.

Sedangkan beras yang diantarpulaukan dari pelabuhan PT. Pelindo IV Kota Pare-Pare pada tahun 2015 disajikan pada Tabel 8, yang menunjukkan bahwa pengiriman beras dominan menuju kota Samarinda dan Balikpapan. Tiga kota tujuan pengiriman terbesar lainnya untuk tujuan pulau Kalimantan adalah Padang, Nunukan dan Pontianak, dan kota lainnya adalah Tanjung Redeb. Pengiriman beras juga dilakukan sampai ke pulau Nusa Tenggara yaitu ke kota Atambua, provinsi NTT. Pengiriman beras pada tahun 2015 terbanyak pada bulan Februari, berbeda dengan pengiriman beras pada tahun yang sama dari pelabuhan Makassar yang jatuh pada bulan Agustus. Pengiriman beras antarpulau dari Pare-Pare

pada tahun-tahun sebelumnya (2012-2014), secara konsisten setiap tahun terbanyak ditujukan ke Samarinda (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Pare-Pare 2016), selanjutnya pengiriman terbesar kedua adalah ke Belawan atau Balikpapan secara bergantian. Tidak diperoleh pola yang konsisten bulan tertentu untuk pengiriman beras terbanyak untuk setiap tahunnya. Pengiriman beras terbesar dari Pare-Pare ke Samarinda tersebut konsisten dengan hasil kajian Yunus (2012) yang menunjukkan pengiriman beras antarpulau ke Kalimantan Timur melalui pelabuhan Pare-Pare, dan Mamuju (perbatasan dengan pulau Kalimantan) dikirim ke Kalimantan Selatan. Pengiriman ke Kalimantan Selatan juga dilakukan melalui Pelabuhan Awaranngge dan Paotere. Pelaku pengiriman beras antarpulau disamping oleh pedagang besar antarpulau, juga oleh pedagang antarpulau yang juga merangkap sebagai pengusaha penggilingan.

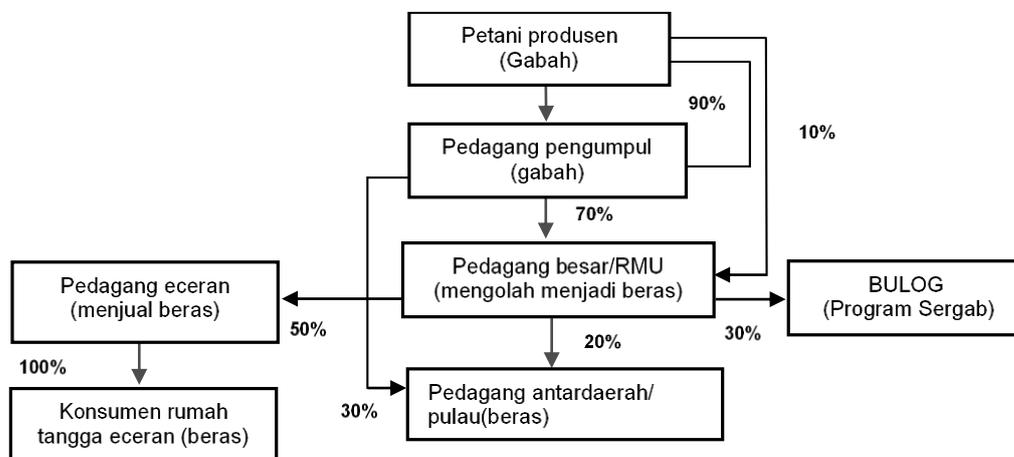
Untuk pengiriman beras dari pelabuhan lainnya, hasil kajian Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan (2015), menunjukkan pengiriman beras dari pelabuhan Aweranngge dan Garongkong di Kabupaten Barru sebagian besar ditujukan ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Pengiriman beras terbesar dilakukan pada bulan Agustus, dan bulan Maret sampai dengan Juni. Dari Kabupaten Pinrang melalui pelabuhan Suppa dan perbatasan Sulawesi Barat, beras diantarpulaukan ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, dan pengiriman terbesar dilakukan

pada bulan Agustus dan September. Sedangkan dari Kabupaten Luwu Timur, melalui pelabuhan Malili, dan perbatasan Sulawesi Tengah dan Luwu Utara, beras diantarpulaukan menuju Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dengan pengiriman terbesar pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. Dilihat dari waktu distribusi beras yang diantarpulaukan menurut periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015 dari masing-masing kabupaten tersebut, juga tidak terlihat pola yang tetap antarkabupaten untuk waktu pengiriman beras terbanyak.

**Rantai Perdagangan Beras**

Rantai perdagangan gabah relatif pendek, petani hanya mempunyai dua alternatif saluran distribusi, menjual gabah kepada pedagang pengumpul di desa (sebagian besar), atau kepada pedagang besar yang pada umumnya merangkap sebagai pengusaha RMU. Sedangkan rantai perdagangan beras dimulai dari pedagang besar/antarpulau, Bulog dan pedagang pengecer (Gambar 4).

Selain itu beras dari pedagang besar juga dijual ke Bulog dalam rangka memenuhi program pemerintah, yaitu program Sergab. Beras yang dijual ke Bulog sekitar 30% dengan harga yang telah ditentukan pemerintah sebesar Rp7.300/kg. Jika sedang panen raya (bulan Maret-April) beras masuk ke Bulog bisa mencapai 50% dari omzet penjualan. Namun jika panen sedikit, beras tidak masuk ke Bulog. Apabila beras dijual ke pedagang antardaerah/ antarpulau memperoleh harga lebih tinggi sekitar Rp7.775/kg.



Sumber: data primer (2016), diolah

Gambar 4. Rantai dan distribusi perdagangan beras di lokasi contoh Kabupaten Pinrang dan Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016

Tabel 7. Volume beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan menurut kota tujuan melalui pelabuhan utama Makassar, periode Januari-Desember 2015 (Ton)

No	Tujuan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Total
1.	Jakarta	13.231	20.014	13.231	9.561	17.391	24.272	4.209	348.006	22.607	6.076	6.947	11.178	183.516
2.	Belawan	7.173	5.612	7.173	8.713	12.359	13.519	5.850	100.641	534	6.093	5.270	5.529	87.889
3.	Ambon	4.774	4.879	4.775	7.416	3.954	6.927	1.715	111.053	4.053	1.957	6.940	4.243	62.738
4.	Surabaya	3.174	861	3.174	2.045	5.280	3.167	2.222	164.619	13.043	1.244	1.061	2.846	54.579
5.	Bitung	3.794	862	3.794	3.322	1.884	5.648	6.209	59.943	2.004	1.059	1.358	1.321	37.249
6.	Banjarmasin	1.956	1.956	1.956	229	1.632	3.065	1.398	40.783	6.122	9.464	1.463	3.291	23.275
7.	Tual	1.574	578	1.574	2.002	1.721	2.065	1.398	28.769	1.457	1.145	1.443		17.853
8.	Temate	995	1.495	995	902	2.381	3.141	230	14.425	957	954	1.443		14.935
9.	Kupang	1.694	948	1.694	891	2.077	559	183	15.575	1.170	1.371	858	1.254	14.256
10.	Sorong	1.593	372	1.593	1.499	1.814	1.023	157	5.955	1.021	380			10.046
11.	Gorontalo	852		852	707	2.369	2.002		599	1.027	53		1.848	7.299
12.	Tobelo					821	1.222	3.015	32.141	646	765			6.465
13.	Dumai													6.229
14.	Kendari	1.606		1.606	580	1.357	849		264		27			6.052
15.	Jayapura	646		646	704	607	184	300	5.038	539	369		1.509	6.008
16.	Balikpapan		2.170		52	26	53	23			1.037	1.138		4.498
17.	Palembang											2.909		2.909
18.	Pantolan												1.850	1.850
19.	Nabire	112		112	315	141	403	83	2.219	154	242			1.784
20.	Kaimana	102		102	78	22	26		268	661	-			1.019
21.	Samptit								8.216		27			848
22.	Samarinda	9		9			130	184	2.352	52				619
23.	Faktak	130		130	26	52	53		254	51	77			544
24.	Serui	44		44	65	76	89		237	44	66			451
25.	Manokwari				129	156			527	53	53			443
26.	Timika				51	79			521	105	127			414
27.	Biak				52	128	52		26	26	77			360
28.	Tarakan													53
29.	Merauke					13								13
	Total	43.460	37.792	43.460	39.340	563.400	68.445	25.776	948.053	56.325	24.195	29.387	34.868	554.193

Sumber: Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (2016), diolah

Tabel 8. Beras yang diantarpulaukan dari pelabuhan Pare-Pare, 2015

(Ton)

No. KotaTujuan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Total
1. Samarinda	6.417	9358	11.146	9.845	8.495	7.982	8.639	10.958	8.648	8.726	10.474	10.024	110.712
2. Balikpapan	9.639	8152	5.320	4.440	4.520	2.870	5.304	5.142	2.980	4.420	5.358	4.825	62.970
3. Padang			2867		2810		4.704		6296				16.677
4. Nunukan		617	591	511	1.034	805	728	1.373	741	1.531	961	1.730	10.622
5. Pontianak		3.000	1000			3.800							7.800
6. Tanj. Redeb	412	417	683	983	547	378	395	531	638	609	650	363	6.606
7. Atambua		4.600											4.600
8. Lampung		150				3300							3.450
9. Bau-Bau					2500								2.500
10. Raha					1100								1.100
11. Kota Baru						1000							1.000
Total	16.468	26.294	21.607	15.779	21.006	20.135	19.770	18.004	19.303	15.286	17.443	16.942	228.037

Sumber: Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Pare-Pare (2016), diolah

Dengan adanya perbedaan harga tersebut, maka beras yang dijual ke Bulog oleh pedagang seringkali dipilih beras yang kualitasnya sedikit di bawah kualitas beras yang dijual ke pasar.

Pembelian beras oleh Bulog melalui program Sergab ditujukan untuk keperluan cadangan atau stok pangan nasional, baik untuk keperluan program Rastra (beras sejahtera) maupun untuk program stabilisasi harga beras jika suatu saat terjadi lonjakan harga beras. Penjualan beras ke Bulog oleh pedagang besar (merangkap penggilingan) merupakan kewajiban bagi pedagang yang menjadi mitra kerja Bulog dalam memenuhi target penyerapan beras oleh Bulog untuk keperluan cadangan beras nasional tersebut.

Pedagang pengumpul menjual gabah ke pedagang besar, atau pedagang antardaerah/ antarpulau yang umumnya merangkap sebagai pengusaha RMU. Pedagang besar/antarpulau merupakan pedagang besar yang memiliki jaringan pasar sampai ke kabupaten, provinsi dan pulau lain (antarpulau). Pedagang besar menjual beras kepada pedagang eceran dan pedagang antarpulau/antardaerah. Pedagang eceran merupakan rantai pemasaran terakhir yang berhadapan langsung dengan konsumen rumah tangga. Pada perdagangan gabah di Kabupaten Sidrap dan Pinrang, pedagang besar membeli gabah dari petani langsung dan dari pedagang pengumpul. Pangsa pembelian gabah oleh pedagang besar ke petani langsung atau pedagang pengumpul bervariasi, namun secara umum pangsa pembelian gabah dari pedagang pengumpul lebih besar (dapat mencapai 70%). Pedagang pengumpul berasal dari berbagai kota (Soppeng, Wajo, dsb) yang khusus datang ke Sidrap atau Pinrang. Pedagang besar pada umumnya merangkap sebagai pengusaha penggilingan sehingga gabah diproses sendiri dan hasilnya dipasarkan baik untuk keperluan antardaerah/antarpulau atau ke pedagang eceran. Pedagang beras

antarpulau juga mencari beras ke kabupaten-kabupaten lain dan dikirimkan langsung melalui pelabuhan terdekat.

Dengan harga patokan yang ditetapkan pemerintah untuk beras seharga Rp7.300/Kg, sementara jika diperdagangkan antarpulau/ daerah harganya lebih tinggi terutama jika sudah melewati panen raya, maka sedikit banyak akan mengurangi margin pedagang beras yang menjadi mitra kerja Bulog, karena pedagang mitra kerja Bulog punya kewajiban untuk memasok beras ke Bulog, meskipun dalam kondisi harga beras di pasaran lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban menjual beras ke Bulog tersebut sedikit banyak juga berpengaruh terhadap distribusi beras yang diantarpulaukan. Namun jika dalam kondisi panen raya, dan harga beras berada di bawah HPP, maka pedagang besar mitra Bulog memperoleh manfaat dengan keberadaan program tersebut karena adanya jaminan harga, meskipun kecenderungan harga di bawah HPP sepanjang tahun 2015-2016 menurut informasi dari hasil survei kejadiannya relatif kecil.

BPS (2016) juga melakukan survei dengan hasil senada dengan hasil kajian ini. Disebutkan bahwa seluruh beras yang diperdagangkan di Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dan 76,28% dari seluruh pasokan beras hanya dijual di dalam wilayah sendiri. Sedangkan sisanya diantarpulaukan atau dijual ke provinsi lain seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Jumlah mata rantai distribusi perdagangan beras dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah lima mata rantai, yaitu petani–pengumpul–agen–pedagang grosir–pedagang eceran–konsumen. Pendistribusi utamanya

melibatkan empat pedagang perantara, yakni pedagang pengumpul, agen, subdistributor, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi beras di Provinsi Sulawesi Selatan. Aliran perdagangan beras tersebut juga melibatkan pemerintah dan lembaga nirlaba serta supermarket. Pemerintah atau lembaga nirlaba memperoleh pasokan dari pedagang pengumpul langsung atau melalui pedagang grosir, sedangkan supermarket memperoleh pasokan dari subdistributor. Aliran beras ke pemerintah dan lembaga nirlaba (dalam hal ini Bulog) sebesar 51,21%, tidak berbeda jauh dengan perkiraan dari hasil kajian pada naskah ini yaitu sekitar 30% sampai 50% pada saat panen raya. Namun hasil survei BPS tidak menangkap informasi penjualan dalam bentuk gabah dari petani ke pedagang pengumpul, melainkan dalam bentuk beras. Disebutkan bahwa pedagang pengumpul yang mendapat pasokan beras dari petani, menjual sebagian besar berasnya ke pemerintah dan lembaga nirlaba (60,42%). Tidak disebutkan secara jelas apakah pedagang pengumpul tersebut membeli beras langsung dari petani atau membeli gabah dari petani dan melakukan penggilingan, baru dijual ke pemerintah/lembaga nirlaba (Bulog). Sementara kondisi di lapang, umumnya yang terjadi adalah sebagian besar (hampir semua) petani menjual hasil produksi ke pedagang pengumpul dalam bentuk gabah, bukan beras. Pada umumnya petani menjual langsung sebagian besar produksi, dan menyisakan sebagian hasil untuk dikonsumsi dan cadangan keperluan biaya sewaktu-waktu diperlukan. Demikian pula pedagang pengumpul pada umumnya menjual kepada pedagang besar/grosir dalam bentuk gabah, sementara yang melakukan penggilingan umumnya pedagang besar dan atau pedagang antarpulau/antardaerah.

Hasil survei BPS tersebut secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut (BPS 2016). Pedagang pengumpul yang mendapat pasokan beras dari petani menjual sebagian besar berasnya ke pemerintah dan lembaga nirlaba (60,42%). Selain itu, pedagang pengumpul juga menjual beras ke pedagang grosir, pedagang eceran, dan rumah tangga. Agen juga mendapat pasokan beras dari pedagang pengumpul. Selanjutnya, agen mendistribusikan beras tersebut ke distributor, pedagang grosir, pedagang eceran dan yang dominan ke subdistributor (47,43%). Distributor menjual sebagian berasnya ke pedagang eceran (82,35%), atau ke supermarket. Sedangkan pedagang grosir menjual sebagian besar berasnya ke pemerintah dan lembaga nirlaba

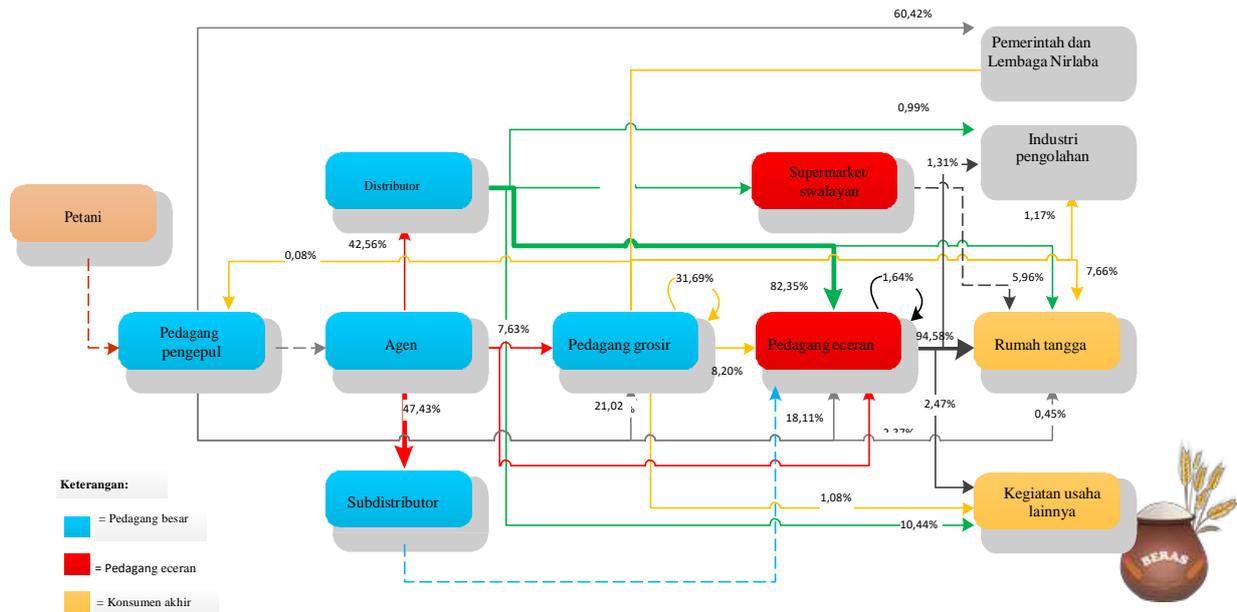
(51,21%). Sementara itu, pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya ke konsumen rumah tangga (94,58%). Selain itu, pedagang eceran pun menjual beras ke sesama pedagang eceran (1,64%), ke industri pengolahan (1,31%) dan kegiatan usaha lainnya (2,47%). Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Selatan dari hasil survei BPS (2016) secara lengkap disajikan pada Gambar 5.

### **Marjin Perdagangan Gabah/Beras**

Marjin perdagangan beras pada hasil kajian ini dianalisis untuk tingkat pedagang pengumpul, pedagang besar atau pedagang antarpulau dan pedagang pengecer. Untuk penghitungan marjin dalam kajian ini harga gabah dan beras dihitung sebagai harga rata-rata selama periode analisis tahun 2016, mengingat harga gabah relatif berfluktuasi antarmusim, demikian juga untuk harga beras digunakan harga beras kualitas sedang (medium).

Dalam rantai tata niaga petani menjual gabah ke pedagang pengumpul. Sebagian besar petani menjual produksinya dalam bentuk gabah langsung di sawah, hanya sebagian kecil yang dibawa pulang untuk disimpan untuk keperluan konsumsi dan cadangan keperluan biaya rumah tangga. Jarang dijumpai petani yang sengaja menjual produksi dalam bentuk olahan beras. Hasil kajian Mustadjab et al. (2008) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyebutkan, keuntungan paling kecil diperoleh petani yang menjual beras, sebaliknya keuntungan paling besar diperoleh petani yang menjual gabah kering. Petani yang menjual beras menganggap penjualan dalam bentuk beras tidak praktis, sehingga tidak banyak petani yang menjual hasil dalam bentuk beras. Pada dasarnya pola penjualan beras atau penyimpanan gabah yang dipilih petani berkaitan dengan beberapa hal, seperti tingkat harga gabah di pasaran, kemampuan penanganan pascapanen, dan kebutuhan uang kontan untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk biaya usaha tani (Mardianto et al. 2005).

Pedagang pengumpul sebagian besar merupakan kepanjangan tangan dan dimodali oleh pedagang besar/antarpulau di Sulawesi Selatan. Kajian Yunus (2012) juga menunjukkan bahwa pedagang besar di Kalimantan Timur bermitra dengan pedagang pengumpul di Sulawesi Selatan yang membeli langsung ke petani, dimana pedagang besar tersebut memberi bantuan permodalan kepada pedagang pengumpul. Pola pemberian modal oleh pedagang besar kepada pedagang pengumpul seperti ini biasa ditemui bukan



Sumber: BPS (2016)

Gambar 5. Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Selatan, 2016

hanya untuk perdagangan antarpulau beras namun juga komoditas pertanian lain. Sebagai contoh untuk perdagangan antarpulau sapi asal Timor ke DKI, rantai perdagangan dimulai dari pedagang besar Jakarta mengirimkan uang pembelian sapi kepada pedagang antarpulau di Kupang, kemudian dibagikan kepada pedagang pengumpul yang akan mencari sapi selanjutnya sapi dikirim oleh pedagang antarpulau ke pedagang besar Jakarta dan pedagang besar di Jakarta menjualnya kepada pemotong atau konsumen (Jermias et al. 2016). Namun juga terdapat pedagang pengumpul gabah mandiri yang tidak dimodali oleh pedagang besar. Pedagang pengumpul membeli gabah ke petani bukan hanya di daerah asal namun juga mencari ke kabupaten-kabupaten lain yang sedang panen, selanjutnya gabah dijual kepada pedagang besar/antarpulau. Proses pengolahan dari gabah menjadi beras mulai dari penjemuran, giling sampai dengan pengemasan siap jual dilakukan oleh pedagang besar/antarpulau yang pada umumnya juga merangkap sebagai

pengusaha penggilingan. Pedagang besar/antarpulau juga menjual beras ke pasar grosir, pedagang pengecer dan atau ke Bulog bagi pedagang besar yang telah memiliki perjanjian kontrak dengan Bulog.

Untuk perdagangan antarpulau, pada umumnya sudah ada kesepakatan harga dan ongkos pengapalan ke daerah tujuan yang ditanggung oleh pembeli. Antara kedua pedagang antarpulau (penjual dan pembeli) umumnya sudah memiliki hubungan. Pembeli dari luar Sulawesi Selatan umumnya mempunyai wakil (kepercayaan) untuk mengurus pengapalan sekaligus pembayaran beras. Ongkos pengiriman dengan menggunakan kapal ditanggung oleh pembeli. Dengan demikian pedagang antarpulau Sulawesi Selatan cukup mengirimkan beras mereka sampai ke pelabuhan. Jika diperlukan menunggu pengapalan, beras transit di gudang dekat pelabuhan atas beban biaya pembeli. Menurut informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Tabel 9. Marjin perdagangan gabah/beras di lokasi contoh Kabupaten Sidrap dan Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016

No	Pelaku	Harga (Rp/kg)	Share (%)	Marjin	
				Rp/kg	(%)
1.	Petani gabah	3.900	43		
2.	Pedagang pengumpul gabah	4.400	49	500	6
3.	Pedagang besar/antarpulau beras	7.775	86	3.375	38
4.	Pedagang pengecer beras	9.000	100	1.225	14

Sumber: data primer (2016), diolah

Pinrang, jumlah pedagang antarpulau dewasa ini semakin berkurang disebabkan munculnya beberapa pengusaha besar di Makassar yang bersedia membeli beras pedagang lokal dengan harga lebih mahal untuk dikirim ke Surabaya, Kalimantan atau daerah-daerah lain di luar Sulawesi Selatan.

Marjin perdagangan mulai tingkat pedagang pengumpul sampai dengan pedagang pengecer beras ditunjukkan pada Tabel 9. Nilai marjin terbesar pada pedagang besar/antarpulau yaitu sebesar Rp3.375/kg beras (38%), kemudian pedagang pengecer sebesar Rp1.225/kg beras (14%), dan marjin terkecil pada pedagang pengumpul gabah yaitu Rp500/kg gabah (6%). Dengan melakukan pengolahan gabah menjadi beras, pedagang besar/antarpulau memperoleh nilai tambah sehingga memperoleh marjin terbesar. Pada dasarnya marjin pemasaran timbul karena pelaku dalam tata niaga sebuah komoditas mengambil keuntungan atas biaya yang dikeluarkannya karena proses mengumpulkan atau menyalurkan komoditas tersebut. Marjin yang diambil menjadi lebih besar jika pelaku yang bersangkutan melakukan aktivitas peningkatan nilai tambah terhadap barang/komoditas tersebut, misalnya sortasi, grading atau pengolahan. Jika dibandingkan dengan hasil kajian Ruauw (2015) di kabupaten kepulauan Talaud, marjin pedagang besar beras giling sebesar Rp2.500 per kg, lebih kecil dari marjin pedagang besar di Sulawesi Selatan. Sementara hasil survei BPS (2016) dengan lokasi contoh yang berbeda memperoleh angka untuk marjin perdagangan dan pengangkutan pedagang besar beras rata-rata 8,69%, pedagang eceran rata-rata 13,21%, sehingga rata-rata perolehan margin pedagang beras di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 10,71%.

Dalam hal ini efisiensi dari kegiatan distribusi komoditas atau tata niaga sangat dipengaruhi oleh panjang mata rantai distribusi dan besarnya marjin keuntungan yang ditetapkan oleh setiap mata rantai distribusi (Prastowo et al. 2008).

Konsisten dengan marjin pada masing-masing tingkat pelaku perdagangan beras di Sulawesi Selatan, nilai keuntungan dan persentase keuntungan terhadap total biaya terbesar dinikmati oleh pedagang besar/antarpulau (Tabel 10), yaitu Rp1.250/Kg beras (19%), pedagang pengecer sebesar Rp1.150/kg beras (15%), sementara pedagang pengumpul gabah memiliki keuntungan paling kecil yaitu Rp375/kg (9%).

Dilihat dari tingkat keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pelaku pada rantai distribusi tersebut (pedagang pengumpul gabah, pedagang besar atau antarpulau beras, dan pedagang pengecer beras), kelihatannya pedagang besar memperoleh tingkat keuntungan paling tinggi untuk setiap kg beras, yaitu Rp1.250, sedangkan pedagang pengecer memperoleh keuntungan Rp1.150/kg. Namun sesungguhnya tingkat keuntungan pedagang besar sebesar nilai tersebut diperoleh melalui proses yang cukup panjang, mulai proses pengolahan gabah menjadi beras sampai dengan pengemasan, sementara tingkat keuntungan pedagang pengecer sebesar Rp1.150/kg beras diperoleh tanpa melalui proses yang panjang seperti halnya pada pedagang besar/antarpulau. Jika tingkat keuntungan tersebut dibuat rasio terhadap biaya *processing* beras (yang mencerminkan upaya/jerih payah untuk menciptakan nilai tambah) pada masing-masing rantai, maka

Tabel 10. Keuntungan pelaku perdagangan gabah/beras di Sulawesi Selatan, 2016

Komponen	Nilai (Rp/kg)
1. Harga gabah tingkat petani	3.900
2. Harga gabah tingkat pedagang pengumpul	4.400
Ongkos bongkar muat	25
Ongkos angkut	100
<b>Keuntungan pedagang pengumpul gabah</b>	<b>375 (9%)</b>
3. Harga beras tingkat pedagang besar/antarpulau	7.775
Nilai konversi gabah ke beras (rendemen 65%)	1.540
Ongkos jemur dan giling	200
Susut 3%	233
Ongkos angkut	100
Ongkos bongkar muat	25
Ongkos pengemasan	25
<b>Keuntungan pedagang besar/antarpulau beras</b>	<b>1.250 (19%)</b>
4. Harga beras di tingkat pedagang pengecer	9.000
Ongkos angkut	50
Ongkos bongkar muat	25
<b>Keuntungan pedagang pengecer beras</b>	<b>1.150 (15%)</b>

Sumber: Data primer, diolah

imbangan antara keuntungan dan biaya pada pedagang eceran jauh lebih besar dibandingkan pada pedagang besar. Namun demikian, dengan mempertimbangkan perbedaan volume beras yang diperdagangkan oleh pedagang besar yang jauh lebih besar daripada pedagang eceran, maka secara total keuntungan usaha yang dinikmati oleh pedagang besar juga akan lebih besar.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Pergerakan harga beras di wilayah konsumen mengikuti pergerakan produksi padi di Sulawesi Selatan sebagai wilayah surplus, namun menunjukkan korelasi yang tidak kuat. Tanda koefisien korelasi antara produksi beras Sulawesi Selatan dengan harga beras Jakarta, Bandung, dan Pontianak bahkan tidak sesuai dengan harapan, dimana peningkatan produksi beras di Sulawesi Selatan seiring dengan peningkatan harga beras di masing-masing wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya berbagai intervensi di pasar beras, dan menunjukkan pula bahwa aliran beras antarpulau tidak semata-mata dipengaruhi oleh perbedaan harga produsen dan konsumen, namun juga oleh faktor lain, misalnya perbedaan kualitas dan preferensi konsumen. Selain itu meningkatnya akses perdagangan antarpulau/ antarwilayah menjadikan produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi produsen beras utama, bukan lagi merupakan satu-satunya barometer terhadap pergerakan harga beras di provinsi lain, khususnya provinsi konsumen.

Perkembangan volume beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan relatif berfluktuasi selama lima tahun terakhir namun menunjukkan pola yang relatif konsisten, yaitu puncak pengiriman terjadi pada bulan Oktober dan menurun pada bulan berikutnya. Sedangkan pengiriman beras terbesar antarkabupaten tidak menunjukkan pola waktu yang konsisten. Pangsa pengiriman beras terbesar di antara sebelas kabupaten pemasok beras antarpulau adalah Kabupaten Pare-Pare (60,5%), kemudian Kabupaten Bone dan Makassar. Pada tahun 2015 Jakarta merupakan kota tujuan pengiriman beras utama dari pelabuhan utama Makassar, kemudian diikuti Belawan dan Ambon, sedangkan tujuan pengiriman beras utama dari pelabuhan Pare-Pare selama lima tahun terakhir adalah ke Samarinda.

Rantai perdagangan gabah dimulai dari petani menjual gabah ke pedagang pengumpul, pedagang pengumpul menjual gabah pedagang besar/antarpulau merangkap penggilingan, selanjutnya pedagang besar (grosir) menjual beras ke pedagang pengecer dan terakhir ke konsumen rumah tangga. Selain itu beras dari pedagang besar juga dijual ke Bulog dalam rangka memenuhi program Serap Gabah sekitar 30-50%. Persentase keuntungan terhadap harga beli terbesar dinikmati oleh pedagang besar/antarpulau yaitu sebesar Rp1.250/kg beras (19%), pedagang pengecer sebesar Rp1.150/kg beras (15%), dan terkecil oleh pedagang pengumpul gabah yaitu Rp375/kg gabah (9%). Demikian pula margin perdagangan terbesar juga pada pedagang besar/antarpulau, selanjutnya pedagang pengecer beras dan paling kecil pada pedagang pengumpul gabah.

### Implikasi Kebijakan

Dengan pertimbangan karakteristik produksi, konsumsi beras, dan pasar beras yang terintegrasi, serta pentingnya beras sebagai komoditas ekonomi dan politik, maka kebijakan perdagangan antarpulau beras dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk stabilisasi harga beras. Untuk itu diperlukan kebijakan Pemerintah yang mengelola jaringan kegiatan pemasaran antartempat dan antarwaktu (pengadaan, penyaluran dan penyimpanan) secara nasional yang disesuaikan dengan besar kecilnya pasar beras di masing-masing wilayah/ daerah.

Dengan keterbatasan infrastruktur untuk melakukan perdagangan antarpulau di wilayah-wilayah tertentu yang dapat menimbulkan biaya tinggi, pemerintah dapat memberikan ruang bagi swasta atau lembaga pemerintah lainnya untuk ikut berperan, namun peran pemerintah harus lebih menonjol untuk menghindari adanya disparitas harga dan kelangkaan ketersediaan pangan yang akan mengganggu wilayah tersebut.

Kebijakan stabilitas harga beras di pasar domestik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat konsumen secara luas dan peningkatan pendapatan petani padi merupakan suatu paket kebijakan yang diperlukan saat ini. Namun kebijakan tersebut juga jangan sampai membebani harga di tingkat pedagang sebagai salah satu pelaku rantai tata niaga beras, mengingat dengan posisinya yang paling kuat dalam rantai tata niaga tersebut, bisa jadi risiko yang mereka terima akan dibebankan kembali kepada petani padi yang selama ini lebih bersifat sebagai *price taker*.

Mengingat sampai penelitian ini dilakukan belum ada peraturan atau perundangan yang mengatur perdagangan antarpulau untuk barang kebutuhan pokok secara umum dan khususnya beras (sedangkan untuk komoditas gula sudah diatur melalui Permendag Nomor 74/M-DAG/PER/9/2015 tentang perdagangan antarpulau gula kristal rafinasi), sementara perdagangan antarpulau beras telah berlangsung lama dan telah menjadi kebutuhan ekonomi dalam rangka menjaga keseimbangan pangan antardaerah, stabilitas harga pangan pokok, dan memperkecil kesenjangan harga beras antardaerah, maka perlu segera ada peraturan atau perundangan yang mengatur tentang perdagangan antarpulau beras, aturan pelaksanaan serta fasilitasi untuk terlaksananya perdagangan antarpulau beras secara lebih baik.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada tim Penelitian DIPA PSEKP tahun 2016, yaitu tim Kajian Peningkatan Kinerja Perdagangan AntarPulau dalam Mendukung Pengembangan Komoditas Pertanian: Cabe, Bawang Merah dan Beras, atas ijin menggunakan sebagian data dan informasi hasil penelitian untuk penulisan naskah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Publikasi Analisis Kebijakan Pertanian atas masukan dan koreksi perbaikan dari awal sampai naskah ini dipublikasikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwari IRM. 2015. Sistem perekonomian kerajaan majapahit. *J Kesejarahan*. 3(2):104-115.
- Aryani. 2012. Integrasi vertikal pasar produsen gabah dengan pasar ritel beras di Indonesia. *J Manaj Teknologi*. 11(2):225-238.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2015. Statistik ketahanan pangan 2014. Jakarta (ID): Badan Ketahanan Pangan.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013a. Statistik harga konsumen 2013. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013b. Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Harga konsumen 2014. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik harga konsumen 2015. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016a. Distribusi perdagangan beras Indonesia. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016b. Statistik Indonesia 2016. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [Balitbangtan] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2016. Panen raya padi di Sulsel, Mentan terjunkan tim serap gabah. <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita/berita-utama/content/300-panen-raya-padi-di-sulsel-mentan-terjunkan-tim-serap-gabah>.
- BULOG. 2012. Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB). diunduh di: <http://www.Bulog.co.id/bisnisupgb.php>.
- Darman. 2013. Perdagangan luar negeri Indonesia-Amerika Serikat. *Binus business review*. 4(2):742-755 .
- [Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan] Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. 2015. Kajian distribusi beras antarpulau Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar (ID): Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
- [Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan] Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. 2016a. Rekap produksi beras bulanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar (ID): Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Povinsi Sulawesi Selatan.
- [Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan] Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. 2016b. Rekap produksi beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar (ID): Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
- Farid M, Subekti NA. 2012. Tinjauan terhadap produksi, konsumsi, distribusi dan dinamika harga cabe di Indonesia. *Bul Ilm Litbang Perdagangan*. 6(2):211-234.
- [Inpres] Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah. Jakarta (ID). Sekretariat Negara RI.
- Ismet M. 2007. Tantangan mewujudkan kebijakan pangan nasional yang kuat. *PANGAN*. 48(XVI): 3-8.

- Jermias JA, Penu CL, Tulle DR, Foenay TAY. 2016. Perdagangan antarpulau sapi bali dari Timor Barat ke DKI Jakarta. *Partn.* 16(2):103-111.
- [Kemendag] Kementerian Perdagangan. 2013. Analisis pendirian pusat distribusi regional. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. Jakarta (ID). Dapat diunduh di [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/ANALISIS\\_KEBERHASILAN\\_PUSAT\\_DISTRIBUSI\\_REGIONAL.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_KEBERHASILAN_PUSAT_DISTRIBUSI_REGIONAL.pdf).
- Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. 2016. Laporan rekapitulasi bongkar muat komoditas berdasarkan asal/tujuan barang bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Makassar (ID): Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan.
- Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Pare-Pare. 2016. Laporan rekapitulasi bongkar muat komoditas berdasarkan asal/tujuan barang bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Pare-Pare (ID). Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan.
- Makbul Y, Ratnaningtyas S, Dwiyanoro P. 2014. Prices Cointegration Analysis between Rice and Paddy in Indonesia: A Preliminary Study. *J of Bus and Economics.* 5(3):390-396.
- Mardianto S, Supriatna Y, Agustin NK. 2005. Dinamika pola pemasaran gabah dan beras di Indonesia. *Forum Penelit Agro Ekon.* 23(2):116-131.
- Mustadjab MM, Setiawan B, Pamungkas C. 2008. Analisis pemasaran beras dalam upaya peningkatan pendapatan petani (Studi Kasus pada Sentra Produksi Padi di Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah). *AGRISE.* VIII(1):1412-1425.
- [Permendag] Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 74/M-Dag/Per/9/2015 tentang perdagangan antarpulau gula kristal rafinasi. Jakarta (ID): Kementerian Perdagangan RI.
- [Permendag] Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-Dag/Per/8/2014 tentang ketentuan umum verifikasi atau penelusuran teknis di bidang perdagangan. Jakarta (ID): Kementerian Perdagangan RI.
- [Perpres] Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Jakarta (ID): Sekretariat Negara RI.
- [Perpres] Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional. Jakarta (ID): Sekretariat Negara RI.
- [Pusdatin] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2015. Outlook komoditas pertanian tanaman pangan padi. Jakarta (ID): Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- Prastowo, NJ, Yanuarti T, Depari Y. 2011. Pengaruh distribusi dalam pembentukan harga komoditas dan implikasinya terhadap inflasi. Working paper WP/07/2008. Bank Indonesia. Jakarta (ID): Diunduh dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/kertaskerja/Documents/7ecb03a80f5748e5a557188ec3f47074WP200807.pdf>.
- Ruauw E. 2015. Kajian distribusi pangan pokok beras di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Agri-Sosioekonomi.* 11(1):58-68.
- Rusastra IW, Rachman B, Sumedi, Sudaryanto T. 2003. Struktur pasar dan pemasaran gabah-beras dan komoditas kompetitor utama. Laporan penelitian kerjasama. Bogor (ID): Puslitbang Sosek Pertanian dengan Bappenas/USAID/DAI.
- Sitorus B. 2014. Perbedaan teknologi produksi: implikasi pada konten faktor perdagangan Indonesia-Amerika. *Bul Ilm Litbang Perdagang.* 8(2):209-228.
- Tabor SR. 2015. Constraints to indonesia's economic growth. *ADB papers on Indonesia No.10.* Metro Manila (PH): Asian Development Bank. Available at <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/178041/ino-paper-10-2015.pdf>.
- [UU] Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara RI.
- [UU] Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan 7 Tahun 2014 tentang Pangan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara RI.
- Yunus K. 2012. Penerapan pola distribusi hasil-hasil pertanian dan tambang antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan dalam perspektif pembangunan ekonomi regional. *ILTEK.* 7(13):982.
- Zain MM, Bakri S, Ibrahim H, Dirawan GD. 2016a. Analysis of factors marketing of commodities rice inter-island in South Sulawesi. *Man In India.* 96(5):1697-1702.
- Zain MM, Syafar AR, Lasumange, Fatmawati. 2016b. Rice farmer institutional strengthening based on agricultural business. *Int J of Scientific & Technology Res.* 5(6):390-393.
- Zain MM, Syafar AR, Lasumange, Fatmawati. 2016c. Evaluation competitiveness of rice and rice production in South Sulawesi. *Int J of Curr Res.* 8(03):28223-28227.
- Zou KH, Tuncali K, Silverman SG. 2003. Statistical concepts series. correlation and simple linear regression. *Radiol.* 227:617-628.